

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur/pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang serta bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.

Metode penelitian skripsi ini yuridis sosiologis, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan juga sumber data yang diperoleh penulis dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, dan dokumen instansi yang berhubungan dengan rumusan masalah, serta melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Semarang.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan izin poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang. Mengetahui jalannya izin poligami atau prosedur pelaksanaanya pada saat Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama Semarang. Berikutnya adalah hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang. Suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Semarang, dengan membebankan syarat-syarat ini dapat menimbulkan hambatan eksternal yaitu sulit mendapat persetujuan poligami dari istri pertamanya. Hambatan internal dalam pelaksanaan izin poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang yaitu pada saat persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon.

Kata Kunci: Pelaksanaan,Izin,Poligami

ABSTRACT

Thesis entitled "Implementation of Polygamy License Under Law no. 1 of 1974 in the Religious Court of Semarang ". The formulation of the problem is how the procedure / implementation of polygamy permit based on Law No. 1 of 1974 in the Religious Courts of Semarang and how barriers to obstacles and solutions in the implementation of polygamy permits based on Law No. 1 of 1974 in the Religious Courts of Semarang.

The research method of this thesis is sociological juridical, the author uses primary data and secondary data that is data obtained from the field and also the source data obtained by the author by reading, studying and understanding through other media sourced from literature, books, and documents which deals with the formulation of the problem, as well as through direct interviews with the Religious Courts of Semarang.

The result of his research is the implementation of polygamy permit according to Law No. 1 of 1974 in the Religious Courts of Semarang. Knowing the course of polygamy permit or its implementation procedure at the time of the Petitioner filed a polygamy permit application by considering certain conditions which must be fulfilled by the Applicant before submitting to the Religious Courts of Semarang. Next is the obstacles and solutions in the implementation of polygamy permits based on Law No. 1 of 1974 in the Religious Courts of Semarang. Husbands who are going to do polygamy must meet the conditions set by the Religious Courts of Semarang, by imposing these conditions may create an external barrier that is difficult to get the approval of polygamy from his first wife. internal barriers in the implementation of polygamy permit according to Law No. 1 of 1974 in the Religious Courts of Semarang is at the time of the trial of the Panel of Judges can not reconcile both parties between the Petitioners and the Respondent.

Keywords: Implementation, Permission, Polygamy